BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif, yang dilakukan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Daerah Kota Cirebon melaksanakan kewajiban melaporkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahanya melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon yang dibuat dengan berpedoman pada ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana KInerja Tahunan, Percanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pmerintah Daerah Kota Cirebon. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2019, RKPD Tahun 2019, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya, kemudian realisasi dan target tersebut dilakukan penghitungan untuk menemukan selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapat strategi yang tepat dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang *(performance improvement)*.

Predikat capaian kinerja dapat dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Predikat Capaian Kinerja Berdasa Kode Warna

Persentase	Predikat	Kode Warna
<100%	Tidak tercapai	
=100%	Tercapai / Sesuai Target	
>100%	Melebihi Target	

Sementara predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tabel Predikat Capaian Kinerja

Predikat	Rata Rata Capaian
Sangat Baik	>90
Baik	75.00 – 89.99
Cukup	65.00 – 74.99
Kurang	50.00 – 64.99
Sangat Kurang	0 – 49.99

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran utama keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis, dimana hal tersebut merupakan ejawantah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Melalui penetapan indikator kinerja utama diharapkan pencapaian kinerja dapat lebih fokus dan terukur. Setelah melalui analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023. Adapun hasil pengukuran atas akuntabilitas kinerja melalui capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut

. :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang					
1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	Pendapatan per Kapita (Juta/Rp)	71,47	74,288	103,47%
		Indeks Daya Beli (Poin)	73,15	132,58	181,24 %
2	Meningkatan akses dan mutu pendidikan	Rata –rata lama Sekolah (Tahun)	10,19	9,90	97,5%
		Harapan lama sekolah (Tahun)	13,43	13,11	97,62

3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,92	72,13	100,29%
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (Persen)	99,01	93,5%	94,5%
4	Meningkatnya pengarusutama an gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender /IDG (Poin)	75,53	75,53	100%
		Indeks Pembangunan Gender /IPG (Poin)	94,20	94,35	100,2%
5	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan (Persen)	31,86	31,57	99,08%
6	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan /PPH (Poin)	79,90	84	105.14
7	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	Meningkatnya PDRB dari Sektor Pariwisata (persen)	5,55	7,72	139%
8	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	Konflik Antar Umat Beragama (kasus)	0	0	100%

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif					
9	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	60	71,21	118,33
10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas laporan keuangan daerah (Nilai)	WTP	WTP	100%
Misi 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan					
11	Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH (Poin)	45	51.96	115.47
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Persen)	2.8	3.85	137.5
Misi ke 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif					
12	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	62,00	76,70	123,70

Dari tabel diatas dapat terlihat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sebagai berikut :

A. Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang

1. Pendapatan per Kapita (Rp.000.000), pencapaian 103,47% dengan predikat **Sangat Baik**
2. Indeks Daya Beli, pencapaian 181,24 % dengan predikat **Sangat Baik**
3. Rata –rata lama Sekolah, pencapaian 97,5% dengan predikat **Sangat Baik**
4. Harapan lama sekolah, pencapaian 97,62% dengan predikat **Sangat Baik**
5. Angka Usia Harapan Hidup, pencapaian 100,29% dengan predikat **Sangat Baik**
6. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, pencapaian 94,25% dengan predikat **Sangat Baik**
7. Indeks Pemberdayaan Gender /IDG, pencapaian 100% dengan predikat **Sangat Baik**
8. Indeks Pembangunan Gender /IPG, Pencapaian 100,2% dengan predikat **Sangat Baik**
9. Peningkatan PDRB, pencapaian 99,08% dengan predikat **Sangat Baik**
10. Skor Pola Pangan Harapan /PPH pencapaian 105,14% dengan predikat **Sangat Baik**
11. Meningkatnya PDRB dari Sektor Pariwisata, pencapaian 139% dengan predikat **Sangat Baik**
12. Konflik Antar Umat Beragama mencapai 100% dengan predikat **Sangat Baik**

B. Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif

1. Indeks Reformasi Birokrasi, pencapaian 118,33% dengan predikat **Sangat Baik**
2. Opini BPK atas laporan keuangan daerah, pencapaian 100% dengan predikat **Sangat Baik**

C. Misi 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH, mencapai 115,47% dengan predikat **Sangat Baik**
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, mencapai 137,5% dengan predikat **Sangat Baik**

D. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadan Ketentraman dan Ketertiban Umum, pencapaian 123,70% dengan predikat **Sangat Baik**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari 11 sasaran dan 17 Indikator, didapati indeikator dengan pencapaian melebihi target 10 , pencapaian sesuai target 100% berjumlah 3, dan pencapaian tidak sesuai target namun dengan predikat Sangat Baik atau >90% berjumlah 4, berikut disajikan persentase hasil pencapaian indikator kinerja utama dalam bentuk diagram :

Gambar 3.1
Diagram realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama

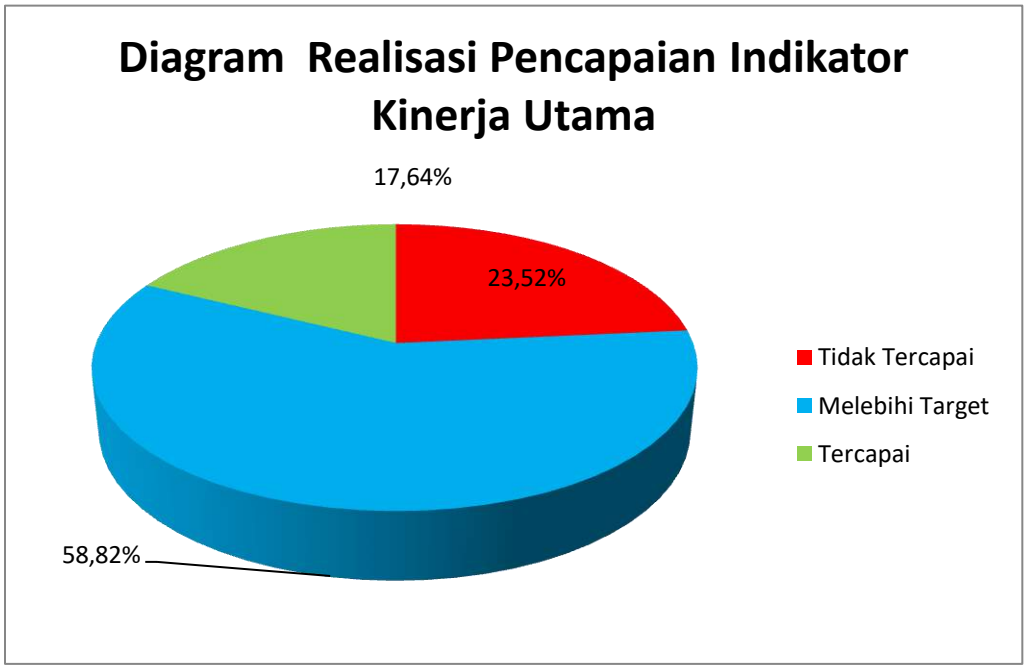

Pencapaian dari Indikator Kinerja Utama juga merupakan capaian dari Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Tahun 2019, hal ini karena seluruh Indikator Kinerja Utama diperjanjikan oleh Wali Kota Cirebon selaku pimpinanan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Sinkronisasi ini merupakan suatu upaya menjamin seluruh indikator kinerja utama sebagai tolak ukur utama dalam pencapaian kinerja dapat menjadi prioritas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan seluruh tujuan serta sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023 akan diuraikan pada sub bab berikutnya, yaitu sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis.

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan terkait pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan , khususnya memberikan gambaran pencapaian terhadap indikator kinerja utama dimana indikator tersebut juga diperjanjikan sebagai Perjanjian Kinerja Wali Kota Tahun 2019. Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis guna mendapatkan informasi yang akurat terkait faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menjadi kendala. Hal ini menjadi informasi yang valid guna melakukan evaluasi terhadap keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu indikator yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya memberi gambaran pencapaian target atas kinerja yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang lebih komprehensif serta dalam rangka keperluan menganalisa dan mengevaluasi seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan, laporan ini memuat juga pengukuran diluar indikator yag diperjanjikan di Tahun 2019 namun menjadi indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai mana memuat visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon periode 2019-2023.

3.2.1 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019

Perjanjian Knerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon dimana telah ditetapkan sebagai Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023 memuat 11 (Sasaran) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Misi 1 : Mewujudkan Kua **litas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang**					
1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	Pendapatan per Kapita (Rp.000.000)	71,47	74,28	103,47%
		Indeks Daya Beli	73,15	132,58	181,24 %
2	Meningkatan akses dan mutu pendidikan	Rata –rata lama Sekolah	10,19	9,90	97,15%
		Harapan lama	13,43	13,11	97,62%

		sekolah			
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Angka Usia Harapan Hidup	71,92	72,13	100,3%
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	99,01	93,5	94,5%
4	Meningkatnya pengarusutama an gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender /IDG	75,53	75,53	100%
		Indeks Pembangunan Gender /IPG	94,20	94,35	100,2%
5	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan	31,8f6	31,57	99,08%
6	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan /PPH	79,90	84	105.14%
7	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	Meningkatnya PDRB dari Sektor Pariwisata	5,55 %	7,72 %	139%

8	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	Konflik Antar Umat Beragama	0	0	100%
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif					
9	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	60	71,21	118,33%
10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
Misi 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan					
11	Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH	45	51.96	115.47%
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	2.8	3.85	137.5%
Misi 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif					
12	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	62,00	72	123,7

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan
Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	Rata-Rata Capaian (%)	0-49,9 Sangat Kurang	50,00-64,99 Kurang	65.00-74.99 Cukup	>90 Sangat Baik
1.	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	2	194,09				V
2	Meningkatan akses dan mutu pendidikan	2	97,85				V
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	2	97,25				V
4	Meningkatnya pengarusutama an gender dan perlindungan anak	2	100,1				V
5	Meningkatkan peran industri,	1	99,08%				V

	perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon						
6	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	1	105.14				V
7	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	1	139%				V
8	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	1	100%				
9	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	1	127,12%				V
10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	100%				V
11	Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	2	126,48				V

12	Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan	1	123,70				V

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bentuk tabel terkait pencapaian sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 , dapat disimpulkan jumlah capaian kinerja sasaran jika dikategorikan dalam predikat pencapaian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Jumlah Sasaran Pada Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Capaian

Predikat	Rata Rata Capaian	Jumlah Sasaran
Sangat Baik	>90	12
Baik	75.00 – 89.99	0
Cukup	65.00 – 74.99	0
Kurang	50.00 – 64.99	0
Sangat Kurang	0 – 49.99	0

Tabel diatas menunjukan seluruh pencapaian sasaran strategis yang diperjanjikan Pemerintah daerah Kota Cirebon mendapat pencapaian dengan predikat

Sangat Baik. Selanjutnya dalam rangka memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait pencapaian kinerja dari sasaran strategis maka diuraikan analisa masing masing tujuan/sasaran secara keseluruhan yang menjadi target dalam sasaran strategis di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama ataupun tidak.

Penjelasan pengukuran, analisa dan evaluasi terkait tujuan/sasaran akan disajikan dalam bentuk uraian utuh yang dimulai dari pengukuran, analisa pencapaian dan evaluasi pada setiap tujuan/sasaran, hal ini karena setiap tujuan/sasaran memiliki kendala dan membutuhkan upaya yang spesifik sehingga analisis dan evaluasi perlu dilakukan pada setiap sasaran. Pengukuran, analisa, dan evaluasi tersebut diuraikan pada sub bab selanjutnya sebagai berikut :

3.2.2 Pengukuran, analisis, dan evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis

Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang

"Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang", sesuai dengan arahan Misi 1, misi 2 dan misi 3 RPJPD yaitu : (1) "Mewujudkan Masyarakat yang Religius"; (2) "Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat"; dan (3) "Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tinggi". Misi tersebut merupakan arahan untuk meningkatkan daya saing pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Misi 1 memiliki 1 Tujuan yang di dukung dengan 14 sasaran sebagai bagian dari kinerja yang tak terpisahkan dalam rangka mendorong terwujudnya Misi 1. Tujuan dan Sasaran masing-masing diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Tujuan Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.
Tahun 2019

NO	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1.1	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.	Pendapatan per Kapita (Rp.000.000)	Juta/rupiah	63,00	71,47	74,28	89,82	103,47%
		Indeks Daya Beli	Poin	72,81	73,15	132,58	73,83	181,24 %
		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	Poin	74,35	74,.55	74,92,	75,73	100,7%
		Indeks Gini	Poin	0,41	0,40	0,43	0,38	92%

Tujuan dalam dalam Misi 1 menjadi gambaran kondisi yang akan dicapai dalam rangka mewujudkna Misi ke-1. Pencapaian dari tujuan dimaksud diukur 4 indikator dimana semua indikator tersebut lazim digunakan dalam mengukur sejauh mana kualitas sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Pendapatan Perkapita :
2. Indeks Daya Beli
3. Indeks Pembangunan Manusia
4. Indeks Gini Ratio

Pencapaian Indikator ke-1 "Pendapatan Perkapita"

Pendapatan perkapita ditetapkan sebagai salah satu indikator sebagai alat ukur sejauh mana kekuatan ekonomi masyarakat yang dihitung dalam perkapita. Berdasarkan hasil pertemuan dan FGD yang dilaksanakan salah satu unit kerja Asisten

Perekonomian dan Pembangunan dengan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, bahwasanya pendapatan perkapita tidak dilakukan penghitungan di tingkat kota, namun pendekatan tersebut disubtitusi dengan pengukuran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sehingga realisasi PDRB ADHB pada tahun 2019 digunakan untuk mensubtitusi realisasi pendapatan perkapita pada tahun 2019.

BPS Kota Cirebon merilis hasil pengukuran PDRB ADHB sebagai subtitusi dari pendapatan perkapita pada tahun 2019 adalah 74,28 (satuan : juta/rupiah), jika disandingkan dengan target pada tahun 2019 sebesar 71,47 maka realisasi melebih target yang ditetapkan dengan pencapaian 103,47% atau **Sangat Baik.**

Pencapaian Indikator ke-2" Indeks Daya Beli"

Indeks Daya Beli ditetapkan sebagai salah satu indikator sebagai alat ukur kemampuan daya beli masyarakat, lazimnya indeks daya beli menjadi salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia pada faktor ekonomi, namun seiring perubahan metode penghitungan pada indeks pembangunan manusia, indeks daya beli disubtitusi dengan indeks harga konsumen. Berdasarkan hasil pertemuan dan FGD yang dilaksanakan salah satu unit kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, indeks harga konsumen disarakan untuk menjadi subtitusi data indeks daya beli.

BPS Kota Cirebon merilis hasil pengukuran indeks harga konsumen sebagai subtitusi dari indeks daya beli pada tahun 2019 adalah 132,58 (satuan :poin), jika disandingkan dengan target pada tahun 2019 sebesar 73,15 maka realisasi melebihi target yang ditetapkan dengan pencapaian 181,24 % atau **Sangat Baik. P**encapian ini sangat tinggi karena pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kota Cirebon meningkat dengan ditandai meningkatnya PDRB di Kota Cirebon, perkembangan di sektor pariwisata dan perdagangan menjadi salah satu faktor pemicu tingginya pertumbuhan eknomi di Kota Cirebon.

Pencapaian Indikator ke - 3 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choices*). IPM merupakan indikator penting untuk

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010.

Berdasarkan data yang di rilis BPS, pembangunan manusia di Kota Cirebon terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon mencapai 74,92, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 74,35. Angka ini meningkat sebesar 0,57 poin atau tumbuh sebesar 0,77 persen dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan IPM selama 5 tahun terakhir (2014-2019) rata-rata sebesar 0,54 persen. Jika disandingkan dengan target pada tahun 2019 yaitu sebesar 74,35 maka pencapaian dari indikator ini mencapai 100,7%, pencapaian yang melebihi target ini dikategorikan sangat baik**.**

Di wilayah Ciayumajakuning IPM Kota Cirebon memiliki poin tertinggi dengan poin sebesar 74,92 sedangkan yang terendah di Kabupaten Indramayu sebesar 66,97. Sebagai gambaran perkembangan IPM di Kota Cirebon dari tahun ke tahun berikut adalah gambar perkembangan nilai IPM di Kota Cirebon :

Gambar 3.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon, 2011-2019

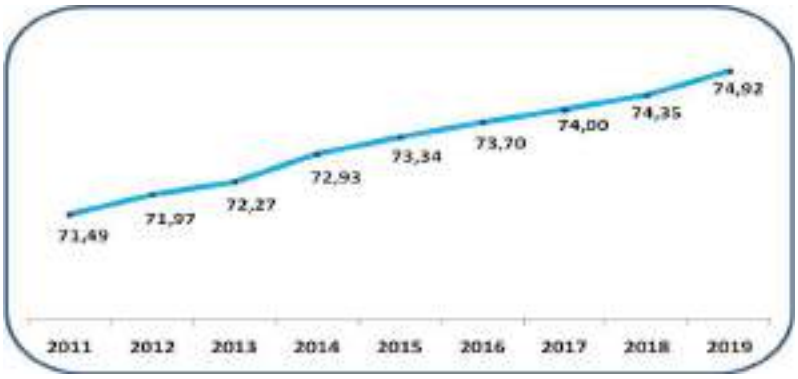

Sumber : BPS Kota Cirebon 2019

Pencapaian Indikator ke - 4 Indeks Gini Ratio

Indeks GIni Ratio merupakan indikator yang lazim digunakan untuk mengukur sejauhmana tingkat kesenjangan yang terjadi di masyarakat , walau ekonomi tumbuh pesat dengan meningkatnya pdrb dan indeks harga konsumen namun belum menunjukan apakah seluruh masyarakat menikmatai pertumbuhan ekonomi tersebut, maka seyogyanya Indeks Gini Ratio dijadikan sebuat indikator dalam upaya mengukur tingkat kesejahteraan riil di masyarakat. Berdasarkan hasil pertemuan dan FGD yang dilaksanakan salah satu unit kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, indeks Gini Ratio Kota Cirebon pada tahun 2019 sedang dalam proses penghitungan dimana data tersebut belum dapat dirilis namun sebagai opsional pengukuran tingkat kesenjangan yang terjadi direkomendasikan menggunakan data 3 tahun terakhir karena menjadi cerminan tingkat kesenjangan yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun terakhir dari rilis BPS terkait indeks gini ratio yang mencerminkan kondisi di tahun 2018 merupakan gambaran yang mirip dengan kondisi di tahun 2019. Berikut adalah grafik tersebut :

Gambar 3.3
Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Gini Ratio , 2015-2018

Sumber : BPS Kota Cirebon, diolah

Data yang disajikan grafik diatas menunjukan bahwa Selama 3 Tahun belakangan, Gini Ratio cenderung melebar di tengah naiknya pertumbuhan ekonomi. namun walau gini rasio meningkat yang berarti kesenjangan melebar, pertumbuhan penduduk miskin justru menurun, hal ini merupakan indikasi bahwa terjadi peningkatan ekonomi yang cukup tinggi di kalangan ekonomi menengah walaupun pertumbuhan ekonomi turut serta dinikmati di kalangan penduduk miskin dengan ditandainya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tersebut cenderung tidak merata.

Dengan nilai indeks gini ratio 0,43 dan target 0,40 dimana pada faktor penghitungan indikator ini semakin rendah semakin baik maka pencapaian target tersebut digunakan rumus sebagai berikut : Target + (Target-Realisasi) / Target di kali 100%, pencapaianya adalah 92,50% atau dalam predikat **Sangat Baik**

Evaluasi Tujuan "Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon"

Tujuan Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon" yang ditetapkan dengan pengukuran pada 4 indikator memilliki rata-rata pencapaian 119%. Pencapaian diatas target menjadi hal yang sangat baik, khususnya dalam bidang ekonomi dimana indikator untuk mengukur tercapainya tujuan ini didominasi indikator pada ranah ekonomi, namun beberapa hal menjadi catatan penting sebagai berikut :

1. Indikator-indikator yang telah ditetapkan tidak lagi relevan dengan perkembangan metode yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik,khususnya pada indikator yang juga ditetapkan menjadi indikator kinerja utama, yaitu pendapatan perkapita, dan indeks daya beli.
2. Indikator yang sudah dinilai tidak relevan seyogyanya menjadi catatan untuk diganti dalam review atau evaluasi RPJMD berkala.

Tercapainya tujuan ditopang dengan sasaran yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan pada Misi 1 ini ,sasaran yang mendukung tujuan ini memiliki 14 sasaran yang masing-masing akan diuraikan analisa nya di bawah ini :

Sasaran 1.1 Meningkatan akses dan mutu pendidikan

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Meningkatan akses dan mutu pendidikan Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian 2019
1.1	Meningkatan akses dan mutu pendidikan	Rata –rata lama Sekolah	Tahun	9,89	10,19	9,90	10,61	97,15%
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,09	13,43	13,11	13,99	97,69%

Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menjadi sasaran strategis Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana tertuang di RPJMD Kota Cirebon 2019-2023, hal ini merupakan upaya mendukung Visi Misi Kota Cirebon dari bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sejalan pada Misi 1 Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran di tetapkan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah

Pencapaian Indikator ke-1 dan ke-2 “Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah”

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Rata rata lama sekolah yaitu 10,19 tahun dan harapan lama sekolah 13,43 tahun. Data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah di Kota Cirebon telah meningkat sebesar 1,01 tahun, sementara Rata-Rata Lama Sekolah meningkat 0,59 tahun.

Selama periode 2011 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,01 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2019, Harapan Lama Sekolah di Kota Cirebon telah mencapai 13,11 yang berarti bahwa anak–anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan hingga Diploma II, namun tidak tamat.

Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Cirebon tumbuh 0,77 persen pertahun selama periode 2011 hingga 2019. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Cirebon yang lebih baik. Pada tahun 2019, Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kota Cirebon usia 25 tahun ke atas mencapai 9,90 tahun, atau telah menduduki jenjang pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I, namun tidak tamat)

Gambar 3.4
Harapan lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah
2011-2019

Sumber : BPS Kota Cirebon

Walaupun kedua indikator itu meningkat dari tahun ke tahun namun pada tahun 2019 target tidak di capai 100%, hal ini karena target yang ditetapkan sangat tinggi. Pencapaian indikator pertama yaitu rata-rata lama sekolah adalah 97,15 % sementara indikator ke dua yaitu harapan lama sekolah adalah 97.61%, walaupun keduanya tidak

mencapai 100% namun keduanya memiliki kategori **Sangat Baik** dalam tingkat pencapaian.

Evaluasi sasaran 1.1.1 "Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan"

Trend positif dalam pencapaian sasaran yang ditunjukan melalui 2 indikator yang meningkat capaianya dari tahun ke tahun, menjadi bukti bahwa setiap tahun akses dan mutu pendidikan di Kota Cirebon semakin baik. Kendati semakin baik namun pencapaian ditahun-tahun berikutnya menjadi sebuah tantangan, pasalnya pada tahun 2019 rata-rata pencapaian indikator dari sasaran adalah 97% tidak sampai 100%. Salah satu kendala utama yang menjadi faktor penyumbang nilai negatif bagi pencapaian akses dan mutu pendidikan ,khususnya pada indikator rata-rata lama sekolah adalah masih ditemukanya penduduk Kota Cirebon yang tidak menyelesaikan Pendidikan Wajar 12 tahun. Melalui monitoring yang dilakukan Dinas Pendidikan, remaja yang putus sekolah pada umumnya di jenjang SMA, yang dikarenakan faktor ekonomi dan kenakalan remaja. Sementara Undang-undang 23 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membatasi kewenangan Dinas Pendidikan secara langsung pada jenjang SMA karena merupakan sub urusan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Strategi dan arah kebijakan yang telah dilaksanakan cukup tepat dengan menerapkan strategi menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau. Strategi tersebut menjadi upaya yang mampu mendorong peningkatan akses dan mut pendidikan dengan didukung program sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang ada seperti disebutkan diatas adalah dengan optimalisasi penerapan strategi yang didukung 5 program tersebut, dan khusus untuk mengurangi angka putus atau tidak melanjutkan pendidikan di jenjang SMA, Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu meningkatkan

koordinasi dengan Pemerintah Provinsi sebagai penanggung jawab sub urusan pendidikan pada jenjang SMA dan melakukan inovasi melalui dorongan motivasi pada remaja/penduduk Kota Cirebon yang mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan jenjang pendidikan SMA.

Sasaran 1.1.2 "Meningkatnya Minat Baca Masyarakat"

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Meningkatnya Minat baca Masyarakat Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian
1.1.2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Rasio Perpustakaan Per satuan Penduduk	Permil	1,385	1,385	1,566	1,958	103%

Meningkatnya minat baca masyarakat merupakan sasaran yang diukur pencapaianya melalui sebuah indikator Rasio Perpustakaan Per satuan Penduduk, rasio jumlah perpustakaan menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kondisi tingkat literasi di suatu wilayah. Perpustakaan Nasional tahun 2015, menyimpulkan bahwa tingkat budaya baca Indonesia secara nasional kategori rendah dengan rata-rata 25,1. Hal ini berkaitan erat dengan jumlah koleksi di Indonesia menurut standar IFLA/UNESCO terjadi kekurangan koleksi sebesar 434,826,292 koleksi pada perpustakaan umum di seluruh Indonesia, jumlah koleksi buku sangat berkaitan erat dengan jumlah perpustakaan. Maka relevan pada sasaran strategis meningkatnya minat baca masyarakat salah satu upaya utama adalah menyediakan infrastruktur dasar bagi warga untuk mengakses bahan bacaan yaitu melalui keberadaan perpustakaan, dalam hal ini perpustakaan diharapkan juga menjelma menjadi tempat tumbuhnya komunitas yang berkaitan erat dengan budaya literasi.

Pencapaian Indikator "Rasio Perpustakaan Per-Satuan Penduduk"

Pada tahun 2019 rasio perpustakaan per-satuan penduduk ditargetkan 1,385 per-mil. Dalam upaya mencapai target tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan berbagai upaya meningkatkan jumlah perpustakaan, khususnya melalu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam membentuk perpustakaan bahkan hingga di tingkat kelurahan atau RW. Melalui berbagai upaya tersebut, berdasarkan pendataan pada tahun 2019 rasio jumlah perpustakaan adalah sebagai berikut : Jumlah perpustakaan sebanyak 510 / 325767 (Jumlah penduduk Kota Cirebon) di kalikan 1000, maka hasilnya adalah 1,566 per mil, jumlah ini melebih target pada tahun 2019 yaitu 1,385 per mil. Pencapaian target tersebut adalah 103% dengan predikat **Sangat Baik**

Evaluasi Sasaran 1.1.2 "Meningkatnya Minat Baca Masyarakat"

Sasaran meningkatnya minat baca masyarakat pada tahun 2019 telah melebih target namun upaya perbaikan tetap diperlukan khususnya untuk melakukan peningkatan di tahun-tahun berikutnya sehingga pada tahun akhir tahun dalam RPJMD target dapat tercapai. Mendororong tumbuhnya infrastruktur dasar terkait literasi yaitu perpusatakaan menjadi hal yang *urgent* untuk meningkatkan minat baca masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu bekerjasama dengan masyarakat umum khususnya komunitas yang bergerak di bidang literasi atau G To S (*Government to Society*) dan juga pihak swasta G to B atau *Governement To Business.* Melalui kolaborasi tersebut tumbuhnya jumlah perpustakaan di Kota Cirebon akan meningkat dan ideal dengan jumlah penduduk. Selain kolaborasi tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon tetap harus mempertahankan upaya yang telah baik dilaksanakan melalui program yang sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Sasaran 1.1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon
Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
'1.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,90	71,92	72,13	72,84	100,3 %
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,00	99,01	93,53	99,05%	94,5 %

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon merupakan sasaran yang diukur pencapaianya dengn dua indikator yaitu angka usia harapan hidup dan cakupan jaminan nasional, melalui sasaran ini Pemerintah Daerah Kota Cirebon berupaya menyasar Misi 1 melalui bidang kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana menjadi inti tujuan dari misi 1 Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan indikator kinerja pertama dari sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon adalah Angka usia harapan hidup yaitu 71,92 tahun dan indikator lainya yaitu cakupan jaminan kesehatan nasional di angka 99,01%.

Pencapaian Indikator ke-1 "Angka harapan hidup"

Angka harapan Hidup saat ini lazim digunakan oleh Badan Pusat Statistik dengan istilah Usia Harapan Hidup Saat Lahir, dimaknai demikian karena penghitungan statistik yang dikeluarkan pertahun menjadikan bayi yang lahir pada tahun tersebut

sebagai acuan atas harapan hidup dengan kondisi faktor-faktor yang membentuk penghitungan angka harapan hidup bayi tersebut. Dalam rilis BPS Kota Cirebon disebutkan *"Bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,13 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya."* Berdasarkan data tersebut maka pencapaian pada indikator pertama/ angka harapan hidup adalah 100,29 % dengan kategori pencapaian sangat baik. Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup ini terdorong oleh adanya penurunan angka kematian bayi yang sangat signifikan dari yang sebelumnya 23 kematian bayi (4/1000 LH) tahun 2018 menjadi 14 kematian bayi (2/1000 LH) pada tahun ini, peningkatan persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif dari 54,9 % tahun 2018 menjadi 64, 7% tahun 2019 dan kenaikan persentase balita 1-4 tahun yang mendapat imunisasi lengkap dari 85,77 % tahun 2018 menjadi 87,46 % pada tahun 2019 Angka Usia Harapan Hidup Kota Cirebon sebesar 72, 13 % telah melebihi target pencapaian pada tahun 2019 yaitu 71,92 sehingga pencapaian kinerja Indikator ini adalah 100,29 % Berikut adalah perkembangan angka harapan hidup/ Usia Harapan Hidup Saat Lahir di Kota Cirebon dari tahun 2011-2019.

Gambar 3.5
Usia Harapan Hidup Saat Lahir

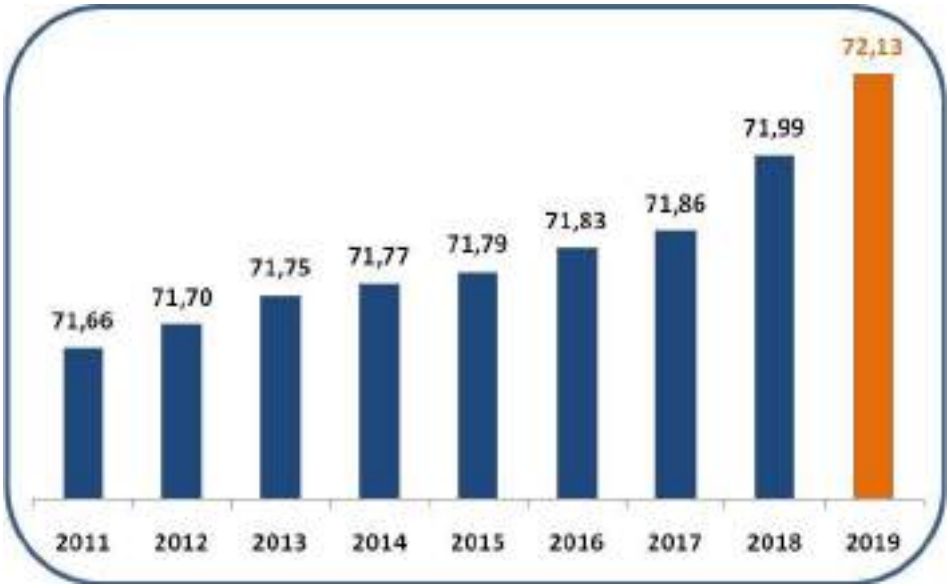

Sumber : BPS Kota Cirebon

Pencapaian Indikator ke-2 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional :

Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar pada tahun 2019 adalah 99,01% Berdasarkan perhitungan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019*)*, Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Cirebon terus mengalami penurunan dibandingkan pada periode tahun-tahun sebelumnya yaitu dari 99% tahun 2017, 97,60% tahun 2018 menjadi 93,53% pada tahun 2019. Berdasarkan data tersebut maka pencapaiannya tidak sampai 100% namun 94,5% walaupun demikian pencapaian tersebut masih berada pada kategori sangat baik. Menurunnya Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional ini dipengaruhi oleh adanya:

1. Pertambahan jumlah penduduk Kota Cirebon sebagai pembagi cakupan kepesertaan JKN_KIS mengalami kenaikan, dari tahun 2017 sejumlah 324.794 jiwa menjadi 334.690 jiwa di tahun 2018 (kenaikan sejumlah 9.896 dari tahun sebelumnya) dan sejumlah 339.607 jiwa pada 2019 kenaikan sejumlah 4.917 jiwa dari tahun sebelumnya) atau 1,5% dari seluruh jumlah kepesertaan JKN-KIS Kota Cirebon.
2. Penonaktifan kepesertaan JKN-KIS PBI APBN (Peserta JKN-KIS yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat), dari jumlah kepesertaan 107.882 jiwa pada tahun 2018 menjadi 93.687 jiwa di Tahun 2019, terjadi penurunan sejumlah 14.195 jiwa atau 4,3% dari seluruh jumlah Kepesertaan JKN-KIS Kota Cirebon.

Gambar 3.4
Data Persentase Peserta BPJS/Jamkesnas Kota Cirebon

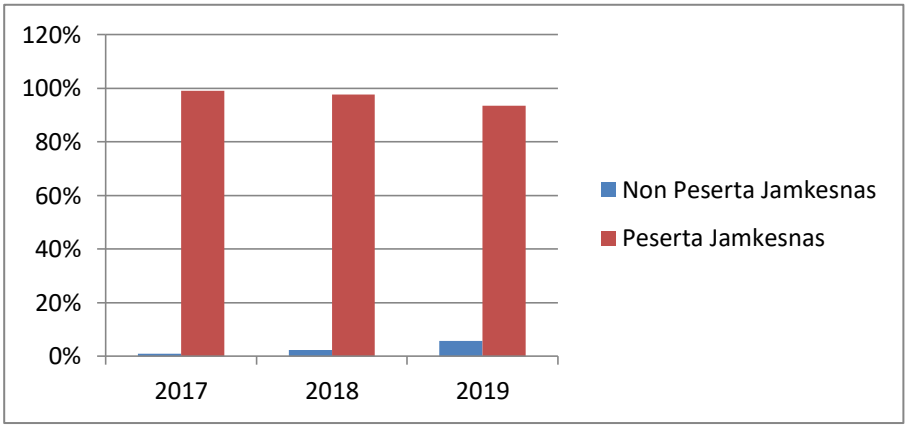

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon, di olah

Trend negatif yang tidak dapat dihindari dalam cakupan jaminan kesehatan nasional utamanya karena faktor para peserta jaminan kesehatan yang menon-aktifkan jaminan kesehatanya atau BPJS. Cukup tingginya penonaktifan BPJS di satu sisi tidak dapat sebagai penarik kesimpulan bahwa kesehatan masyarakat Kota Cirebon khususnya warga tidak mampu kurang terjamin kesehatanya, karena seyogyanya penonaktifan BPJS tersebut belum tentu dilakukan oleh warga miskin. Sebagai upaya antisipasi mewujudkan *Universal Health Coverage* (*UHC)*, Pemerintah Daerah telah memastikan bahwa masyarakat tidak mampu tetap dapat memiliki akses kesehatan melalui program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. Hal inilah yang menjadi faktor penentu bahwa derajat kesehatan di Kota Cirebon pada umumnya meningkat walaupun disatu sisi cakupan jaminan kesehatan sebagai salah satu indikator menurun

Sebagaimana target telah ditetapkan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon tetap mendorong masyarakatnya untuk mendapat jaminan kesehatan nasional yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, untuk mendukung keberlangsungan Program JKN-KIS Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah melakukan deklarasi Cirebon Menuju UHC pada tahun 2018 dan terus memantau hal-hal yang dideklarasikan tersebut pada tahun 2019. **Deklarasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Menuju UHC Tahun 2018** ditandatangani oleh :

1. Wali Kota Cirebon;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Kepala Dinas Pendidikan;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
9. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

Dengan peran dari masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
   Untuk Data penduduk Kota Cirebon berdasarkan pekerjaan, dalam kepesertaan PBPU.

2. Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
   Untuk pendaftaran JKN di lingkungan Sekolah (TK, SD dan SMP), dalam kepesertaan PPU.
   - Himbauan pendaftaran JKN-KIS;
   - Guru/ Pegawai sekolah wajib JKN;

3. Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cirebon.
   Untuk Pegawai Honorer wajib pendaftaran JKN, dalam peserta PPU.

4. Disnakertrans Kota Cirebon. :
   Untuk memastikan seluruh Perusahaan/ Badan Usaha sudah megikuti Program JKN-KIS, dalam kepesertaan PPU.
   - Menghimbau kepada seluruh Perusahaan/ Badan Usaha;
   - Pengawasan terhadap perusahaan/ Badan Usaha;

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
   Untuk memastikan perusahaan mendaftar Program JKN, dalam PPU.
   - Sebagai kewajiban perizinan perusahaan;

6. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Cirebon.
   Untuk memastikan Koperasi dan UKM terdaftar Program JKN-KIS

Sasaran 1.1.4 : Terkendalinya jumlah penduduk

Tabel 3.11
Capaian Sasaran Terkendalinya jumlah penduduk Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1.1.4	Terkendalinya jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Permil	0,68	0,67	0,54	0,93	119,4%

Terkendalinya Jumlah penduduk menjadi salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Misi 3 Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia diyakini sangat dipengaruhi dengan faktor jumlah penduduk, jumlah penduduk yang tidak terkendali menjadi kendala dalam proses pembangunan sehingga diperlukanya pengendalian penduduk. Sasaran yang sangat strategis dalam pembangunan ini di ukur dengan sebuah indikator kinerja yaitu laju pertumbuhan penduduk

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,67% sedangkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Laju pertumbuhan penduduk Kota Cirebon pada tahun 2019 sebesar 0,54%, dimana trend menurun semakin baik dalam pencapaian kinerjanya maka menggunakan rumus Pencapaian Kinerja = Target + (Target-Realisasi) / Target kemudian dikali 100%, sehingga dengan pertumbuhan 0,54% maka pencapaian dari indikator kinerja adalah 119,4% dengan predikat atau kategori **Sangat Baik.** Pencapaian sasaran dengan satu indikator ini tak lepas dari suksesnya program yang telah dilaksanakan oleh Dinas pengampu urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Program tersebut sebagai berikut :

1. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Program Keluarga Berencana

3. Program Pengendalian Penduduk
4. Program Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk

Salah satu inovasi dalam pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana mencanangkan “Kampung KB’ di banyak kelurahan, melalui pembenahan kampung bahkan melukis mural di kampung/kelurahan, sosialisasi pengendalian penduduk dapat dengan mudah dilaksanakan sehingga program-program Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana cukup efektif dan efesien.

Sasaran 1.1.5 Menurunnya Tingkat Pengangguran

Tabel 3.12
Capaian Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1.1.5	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	68,03	69,03	62,84	72,48	91,03%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,06	8,83	8,98	7,91	98,03%
		Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	90,94	91,14	91,02	91,94	99,85%

Menurunnya Tingkat Pengangguran menjadi salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Misi 1 Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul salah satunya di tandai dengan rendah nya tingkat pengangguran, indikator ini relevan karena salah satu korelasi penting antara tingkat

pengangguran dan kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pengangguran berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang sangat strategis dalam pembangunan ini di ukur dengan tiga (3) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Tingkat Kesempatan Kerja

Pencapaian Indikator ke-1 "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja"

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah sebesar 69,03 sedangkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2019 sejumlah 62,84. Berdasarkan data tersebut maka realisasi tidak mencapai target, yaitu sebesar 91,03 %. Kendati demikian pencapaian tersebut berada pada predikat **Sangat Baik.**

Pencapaian Indikator ke-2 "Tingkat Pengangguran Terbuka"

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar 8,83 sedangkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2019 sejumlah 8,93. Berdasarkan data tersebut maka realisasi tidak mencapai target, karena pencapaian indikator ini adalah jenis pencapaian trend menurun sebagai pencapaian kinerja yang positif, sehingga penghitungan pencapaian tersebut menggunakan rumus : Target–(Realisasi-Target) / Realisasi di kalikan 100% dengan hasil 98,30%. Kendati demikian pencapaian tersebut berada pada predikat S**angat Baik.**

Pencapaian Indikator ke-3 "Tingkat Kesempatan Kerja"

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Tingkat Kesempatan Kerja adalah sebesar 91,14 sedangkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon Tingkat Kesempatan Kerja pada tahun 2019 sejumlah 91,02. Berdasarkan data tersebut maka pencapaian atas realisas di tahun 2019 adalah 99,85%, Kendati demikian pencapaian tersebut berada pada predikat **Sangat Baik.**

Evaluasi Sasaran 1.1.5 "Menurunnya Tingkat Pengangguran"

Pencapaian sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran dengan tiga (3) indikator memiliki rata-rata pencapaian sebesar 96,39%, kendati tidak mencapai 100% namun pencapaian ini berada dalam predikat **Sangat Baik**. Kendala pencapaian dalam sasaran ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bonus demografi yang tinggi di Kota Cirebon
2. Arus imigrasi (masuknya penduduk dari luar Kota Cirebon) yang mencari pekerjaan di Kota Cirebon, seiring pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon khususnya di bidang pariwisata dan perdagangan.

Upaya yang telah dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan yang didudkung dengan beberapa program seyogyanya telah mencapai hasil yang cukup baik, namun untuk menekan tingkat pengganggguran sesuai target yang telah ditetapkan atau bahkan pencapaian yang lebih baik Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu melakukan upaya antisipasi atas kendala diatas sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi atas program yang telah berjalan
2. Mereview kembali grand design pertumbuhan dan pengendalian penduduk serta menjadikan proyeksi pertumubhan penduduk sebagai pertimbangan strategis dalam perencanaan pembangunan.
3. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kota sekitar untuk melakukan manajemen terkait pengendalian perpindahan penduduk/ arus urbanisasi, diantaranya melalui kerjasama Gran Design pembangunan zona ekonomi kewilayahan.

Sasaran 1.1.6 : Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda.

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda
Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1.1.6	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda.	Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional	Atlet	2	2	2	9	100%
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	50	50	46,30	70	92,60

Sebagai sebuah tolak ukur manusia Cirebon yang unggul dalam segala bidang maka relevan meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda di jadikan sebagai sebuah sasaran. Sasaran meningkatnya prestasi ini di lihat dari dua aspek dengan indikator kinerja Jumlah atlet Olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional dan Persentase organisasi pemuda yang aktif. Mengutip kata prestasi ada kritik terhadap indikator jumlah atlet yang berkompetisi, dimana indikator ini tidak menyebutkan secara gamblang pencapaian prestasi, namun sesungguhnya Cirebon sebagai Pemerintah Daerah yang berada pada tingkat kotayang memiliki jenjang 2 level di bawah tingkat nasional, maka menargetkan atlet yang berkompetisi di tingkat nasional secara tidak langsung telah menargetkan juara pada tingkat provinsi, jika juara adalah sebuah acuan prestasi dalam bidang olahraga maka jumlah atlet yang berkompetisi di tingkat nasional cukup relevan karena dipastikan atlet yang berasal dari tingkat kota berkompetisi di tingkat nasional telah melampaui jenjang tingkat provinsi dan mendapat gelar juara atau memiliki prestasi pada tingkat provinsi sebagai salah satu syarat maju ke tingkat

nasional. Sedangkan indikator kedua jumlah persentase pemuda yang aktif menjadi sebuah tolak ukur prestasi di bidang kepemudaan. Pada ranah kepemudaan , kapabilitas individu seorang pemuda pada umumnya dinilai melalui prestasi di bidang akademik (pendidikan) dan prestasi non akademik yang sering dikaitkan dengan keaktifan di dunia organisasi sosial kepemudaan. Berdasarkan hal itulah maka keaktifan organisasi pemuda (yang sangat ditentukan faktor individu pemuda dalam organisasi tersebut) menjadi sebuah tolak ukur sebagai salah satu wujud prestasi di bidang kepemudaan.

Pencapaian Indikator ke-1 "Jumlah atlet olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional"

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan 2 atlet untuk berkompetisi di tingkat nasional.indikator tersebut tercapai dengan adanya dua atlet yang berprestasi di tingkat provinsi dan berhasil tampil di tingkat nasional yaitu atas nama Nony Krystiantyi Andilah Cabor Bilyard dan Ryan Antoni dari Cabor Hoki Underwater. Capaian indikator sasaran "Jumlah atlet lokal yang berkompetisi di tingkat nasional" dapat tercapai 100% atau kategiri **Sangat Baik**.

Tabel 3.14
Daftar Atlet Berprestasi

No	Nama	Prestasi	Cabor
1	Nony Krystianti Andilah	Juara II	Bilyard
2	Ryan Antoni	Juara II	Hoki Underwater

SUMBER : LAPORAN KINERJA DKOKP 2019, DI OLAH

Meski sudah mencapai target yang telah ditetapkan Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon tetap berusaha melahirkan atlet-atlet berprestasi dari cabor-cabor lainnya. DKOKP Kota Cirebon akan memperbaiki pembibitan atlet-atlet usia dini, serta melakukan pemanduan bakat terhadap calon bibit atlet usia dini. Ditingkat sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama, DKOKP menyelenggarakan ajang Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA) yang dapat menjadi ajang untuk para pelajar berkompetisi dan menunjukkan bakatnya. Selain POPKOTA, event lain yang rutin diikuti oleh DKOKP Kota Cirebon adalah O2SN, POPWILDA, dan POPDA, untuk menjaring dan melahirkan atlet-atlet berbakat yang akan dikirimkan ke POPNAS maupun ajang tingkat nasional lainnya.

Pencapaian Indikator ke-2 "Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif "

Capaian kinerja sasaran Prosentase organisasi pemuda yang aktif dapat tercapai sebesar 92,6 % atau "BAIK". Dari target keaktifan organisasi pemuda sebesar 50%, realisasi capaian indikator adalah sebanyak 46,30%. Nilai tersebut didapat dari total organisasi pemuda sebanyak 54 organisasi, hanya 25 organisasi yang aktif. Pengertian aktif tersebut adalah dilihat dari keaktifan organisasi tersebut dalam merekrut dan kaderisasi anggota organisasi yang baru.

Berikut adalah daftar organisasi pemuda Kota Cirebon dengan keterangan aktif dan tidak aktif

Tabel 3.15
Daftar Organisasi Pemuda Kota Cirebon

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH ANGGOTA	Keterangan
1	Pemuda Demokrat Indonesia	50	Tidak Aktif
2	AMS	150	Aktif
3	HMI	250	Aktif
4	KOHATI	100	Aktif
5	PP	100	Aktif

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH ANGGOTA	Keterangan
6	SAPMA PP	100	Aktif
7	SRIKANDI PP	100	Aktif
8	PPM	100	Aktif
9	BKPRMI	100	Aktif
10	GP ANSOR	300	Aktif
11	NASYIATUL ASSIYAH	100	Aktif
12	IPM	100	Aktif
13	GMNI	100	Aktif
14	SARINAH	50	Tidak Aktif
15	FATAYAT	250	Aktif
16	IPNU	100	Aktif
17	IPPNU	100	Aktif
18	KOPRI	50	Tidak Aktif
19	GP KA'BAH	25	Tidak Aktif
20	REPDEM	25	Tidak Aktif
21	GM FKPPI	100	Aktif
22	AMPI	50	Tidak Aktif
23	GM DEMOKRAT	25	Tidak Aktif
24	GM KOSGORO	50	Tidak Aktif
25	FKPPK	25	Tidak Aktif
26	MKGR	25	Tidak Aktif
27	BMI	50	Tidak Aktif

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH ANGGOTA	Keterangan
28	PPI	1000	Aktif
29	PMI	25	Tidak Aktif
30	KOTI MAHATIDAN	200	Aktif
31	FS PRMI	25	Tidak Aktif
32	Pemuda Muhammadiyah	100	Aktif
33	Hizbul wathon	300	Aktif
34	IMM	100	Aktif
35	WKI	25	Tidak Aktif
36	BBC	25	Tidak Aktif
37	KAMMI	50	Tidak Aktif
38	GM PERSATUAN	25	Tidak Aktif
39	AM KA'BAH	25	Tidak Aktif
40	SATRIYA	25	Tidak Aktif
41	AMII	25	Tidak Aktif
42	BIM PAN	25	Tidak Aktif
43	BALADIKA KARYA	25	Tidak Aktif
44	MASIKA ICMI	25	Tidak Aktif
45	PPD	50	Tidak Aktif
46	AMSI	25	Tidak Aktif
47	KHATOLIK	0	Tidak Aktif
48	P KIARA	0	Tidak Aktif
49	PPAPRI	0	Tidak Aktif

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH ANGGOTA	Keterangan
50	GMPI	25	Tidak Aktif
51	BM KOSGORO	100	Aktif
52	IPM	100	Aktif
53	PMII	100	Aktif
54	TAPAK SUCI	100	Aktif
JUMLAH		5100	Aktif : 25 Tidak aktif : 29

Evaluasi terhadap capaian sasaran 1.1.6 "Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga"

Pencapaian sasaran yang ditunjukan dengan dua indikator diatas sudah menunjukan pencapaian yang sangat baik yaitu rata rata pencapaian 96.3 %, pencapaian sasaran ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
4. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Namun ada kendala khususnya dalam mencapai indikator kedua dengan target keaktifan organisasi pemuda sebesar 50%, indikator ini tidak mencapai 100% dikarenakan sulitnya intervensi untuk masuk ke ranah organisasi kepemudaan yang memiliki independensi nya sendiri. Sebagai upaya tindak lanjut atas kendala tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Pariwisata akan menyiapkan strategsi stimulus keaktifan organisasi kepemudaan diantaranya :

1. Pertemuan rutin antar organisasi kepemudaan yang difasilitasi Pemerintah Daerah.
2. Menyelenggarakan event-event kepemudaan dengan frekuensi dan kualitas yang lebih baik.
3. Inovasi pemberian penghargaan kepada Organisasi Kepemudaan yang memberikan sumbangsih bai kemajuan Kota Cirebon.

Sasaran 1.1.7 : Meningkatnya Pengarustamanan gender dan perlindungan anak

Tabel 3.16
Capaian Sasaran Meningkatnya pengarusutama an gender dan perlindungan anak
Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1.1.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender /IDG	Poin	74,23	75,53	75,53	78,47	100%
		Indeks Pembangunan Gender /IPG	Poin	93,94	94,20	94,35	94,46	100.2%

Meningkatnya pengarusutamaan Gender menjadi penunjang Misi 1 Pemerintah Daerah Kota Cirebon, hal ini sebagai upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia khususnya dari segi persoalan gender untuk lebih baik dan terus meningkat dari tahun-ketahunnya. Sudah lazim isu gender dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusia sebuah masyarakat yang beradab, bahkan dalam skala nasional hingga internasional persoalan gender menjadi isu yang cukup strategis. Meningkatnya pengarusutamaan gender di ukur dalam dua indikator yaitu Indeks Pemberdayaan

Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender menggambarkan kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi sedangkan Indeks Pembangunan Gender menggambarkan *gap* atau kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan wanita.

Pencapaian Indikator ke-1 ”Indeks Pemberdayaan Gender”

Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2019 ditargetkan naik 1.7 Poin yang semula 74,23 menjadi 75,35 pada tahun 2019. Hasil pengukuran yang dilakukan Dinas social Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, realisasi poin Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Cirebon adalah 75,35 hal ini berarti target tercapai 100% atau berpredikat **Sangat Baik.** BPS sesungguhnya sampai Laporan ini disusun masih belum secara resmi mengumumkan hasil penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender namun Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun penghitungan Indeks Pemberrdayaan Gender melalui koordinasi dengan BPS, dipastikan selisih data yang dikeluarkan oleh Dinas dan BPS tidak akan jauh berbeda dan jika terjadi perbedaaan data dikemudian hari, faktor-faktor penghitungan menunjukan tidak akan kurang dari poin 75,35.

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Perempuan sangat dipengaruhi peningkatan peran perempuan dalam aspek politik khususnya jumlah perempuan yang mengambil peran di lembaga legislative di Kota Cirebon serta Pemerintah Daerah Kota Cirebon dimana Wakil Wali Kota Cirebon saat ini di jabat oleh seorang wanita.

Pencapaian Indikator ke-2 ”Indeks Pembangunan Gender”

Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2019 naik 0,41 poin dari kondisi selebumnya di tahun 2018 yaitu sebesar 93,35 poin, jika dibandingkan dengan target pada tahun 2019 94,20 maka pencapaian Indeks Pembangunan Gender melebih target yaitu sebesar 100,15%. Indeks Pembangunan Gender mengalami kenaikan khususnya karena adanya peningkatan kesetaraan antara indeks pembangunan manusia laki-laki

dan perempuan,peningkatan kesetaraan ini didorong oleh meningkatnya jumlah perempuan yang mengakses pendidikan dengan layak, peran ekonomi dimana meningkatnya umkm yang dikelola oleh perempuan. berikut adalah tabel gamb perkembangan indeks pembangunan manusia dari tahun 2017-2019.

Gambar 3.6
Indeks Pembangunan Gender Kota Cirebon

SUMBER : BPS KOTA CIREBON

Evaluasi terhadap capaian sasaran 1.1.7 "Meningkatnya Pengarusutamaan Gender"

Pencapaian sasaran yang ditunjukan dengan dua indikator diatas sudah menunjukan pencapaian yang sangat baik yaitu dengan rata-rata pencapaian 100,1 %, pencapaian sasaran ini didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam
3. PembangunanProgram Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Walau pencapaian telah melebih target atau sangat baik, namun untuk mempertahankan kinerja dan peningkatan kami tetap melihat kelemahan dalam pencapaian sasaran ini. Membangun pengarusutamaan gender dengan ditunjukan melalui indikator indeks pemberdayaan dan pembangunan gender sangat fluktuatif dan dinamis, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengukuran indeks, khususnya pada

indeks pemberdayaan sangat tergantung pada peran individu subjek gender dalam hal ini wanita kota Cirebon. Meningkatkan sumber daya manusia dan keadilan akses terhadap fasilitas yang di bangun terhadap perempuan belum tentu meningkatkan keberdayaan atas perempuan. namun diperlukan adanya keberpihakan yang lebih nyata terhadap wanita di Kota Cirebon, hal ini senada dengan perhatian global pada isu gender, dimana isu gender menjadi isu utama pada pembangunan yang digariskan di Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals). Untuk mendorong hal tersebut Kota Cirebon perlu mengambil langkah sebagai berikut :

1. Lebih aktif dalam partisipasi agenda dunia dan nasional terkait isu gender salah satunya *He for She*, agenda ini adalah sebuah gerakan untuk meingkatan kesadaran para lelaki/pria agar peduli pada isu gender.
2. Menambah frekuensi dan terus meningkatkan kualitas pembinaan secara wawasan baik isu politik dan ekonomi pada perempuan di Kota Cirebon agar memiliki motivasi untuk ikut dalam pembangunan juga politik.
3. Meningkatkan fasilitasi terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan.
4. Meningkatkanfokus pada agenda pembangunan yang memberikan perempuan ruang untuk berkarya.

Sasaran 1.1.8 : Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1.1.8	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	Peningkatan PDRB dari sektor industri	Persen	10,29	10,30	10,17	10,34	98,74%,
		Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan	Persen	31,74	31,86	31,57	32,34%	99,09%

Meningkatkan Peran Industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon menjadi faktor yang menunjang dalam mewujudkan kualitas sumber day manusia khususnya di bidang ekonomi. Sasaran ini memiliki dua indikator kinerja dalam mengukur pencapaian yaitu : Peningkatan PDRB dari Sektor Industri dan Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan.

Pencapaian Indikator ke-1 " Peningkatan PDRB dari sektor industri"

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Peningkatan PDRB dari sektor industri 10,30 persen. Berdasarkan data BPS PDRB Kota Cirebon tercapai pada posisi 10,17 persen Pencapaian ini belum mencapai target tahun 2019 atau capaianya sekitar 98,74%, kendati tidak memenuhi target 100% namun tetap berada dalam predikat pencapaian **Sangat Baik.** Tidak tercapainya nilai PDRB pada sektor industri pengolahan terjadi karena adanya perubahan besar peranan pada sektor

industri pengolahan sebesar 0,10 poin, tetapi bila dilihat dari lapangan usaha sektor industri mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 5,63 %.

Pencapaian Indikator ke-2 " Peningkatan PDRB dari sektor Perdagangan"

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan 31.86 persen sementara berdasarkan data BPS PDRB Kota Cirebon mengalami peningkatan 31,57 persen, pencapaian ini belum sesuai target tahun 2019 atau dengan persentase capaian indikator sebesar 99,09%, kendati tidak mencapai 100% pencapaian ini masih berada pada predikat **Sangat Baik.**

Tdak tercapainya nilai PDRB pada sektor perdagangan yang terdiri dari perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil serta sepeda motor terjadi karena adanya perubahan besar peranan pada sektor perdagangan sebesar 0,09 poin, tetapi bila dilihat di lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 5,91 %. Selain karena perubahan peranan pada sektor perdagangan kondisi ini juga dipengaruhi meningkatnya inflasi yang menyebabkan sulit tumbuhnya peningkatan PDRB di sector perdagangan.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1.1.8 : Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon

Pencapaian Sasaran "Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon" tergambarkan dari rata-rata pencapaian kedua indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu sebesar 98,58%. Walau berada ada predikat pencapaian sangat baik, namun belum tercapai sepenuhnya. Dukungan program yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2. Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
5. Program Metrologi Legal
6. Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi
9. Program Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat

Sebagai upaya perbaikan kedepan dan memenuhi target atau bahkan dapat melebihi target yang ditetapkanPemerintah Daerah Kota Cirebon memastikan peningkatan efektifitas dan efsiensi pelaksanaan program-program yang mendukung pencapaian sasaran, khususnya untuk melakukan *counter terhadap* kendala atau penyebab seperti yang disebutkan pada penjelasan pencapaian kedua indikator tersebut, program yang harus ditingkatkan adalah :

1. Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri guna memicu pertumbuhan industri.
2. Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah guna memicu pertumbuhan kewirausahaan dan UKM yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di sektor perdagangan
4. Meningkatkan koordinasi dengan Kementrian terkait serta Kabupaten Kota di sekitar wilayah 3 Cirebon guna mengambil tindakan yang tepat terkait inflasi.

Sasaran 1.1.9 Berkurangnya Penduduk Miskin

Tabel 3.18
Capaian Sasaran Berkurangnya Penduduk Miskin Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1.1.9	Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin	Persen	8,88	8,53	8,41	7,13	105,3%

Pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu agenda prioritas dalam kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, hal ini senada dengan isu pada skala nasional bahkan global dimana saat ini pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu isu utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai pengganti Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015. Sebagai upaya pemberantasan kemiskinan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan sasaran yaitu “Berkurangnya Penduduk Miskin” untuk mendukung pencapaian misi ke-1. Sasaran tersebut memiliki tolak ukur pencapaian sebuah indikator kinerja “Presentase Penduduk Miskin” dimana dari tahun ketahun ditargetkan semakin menurun.

Pencapaian Indikator “Persentase Penduduk Miskin”

Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan persentase penduduk miskin sebesar 8,53% dari total penduduk wilayah Kota Cirebon, menurun 0,35% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 menurun hingga 0,44% dari tahun sebelumnya dimana jumlah penduduk miskin pada 2018 tercatat sebanyak 8,88% atau 28,03 ribu orang dan pada 2019 tercatat menjadi 26,80 ribu orang. Pencapaian indikator pada sasaran ini mencapai lebih dari 100% yaitu 105,3%. Pencapaian ini dipengaruhi berbagai faktor, selain program pada Dinas pengampu urusan sosial yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, namun para pemangku kepentingan di lingkup faktor tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan mempengaruhi kondisi kemiskinan di Kota Cirebon. Atas kerjasama para pemangku kepentingan baik Perangkat Daerah sebagai pelaksana kebijakan Walikota dan Wakil Wali Kota Cirebon dan para Non Government Organisation *NGO* yang berasal dari masyarakat serta pihak swasta sehingga pencapaian pemberantasan kemiskinan **sangat baik** di tahun 2019.

Gambar 3.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2010-2019

Sumber : BPS Kota Cirebon

Evaluasi Sasaran 1.1.9 "Berkurangnya Penduduk Miskin"

Pencapaian pada tahun 2019 telah sangat baik dan melampaui target namun peningkatan kinerja khususnya dalam rangka pengurangan penduduk miskin harus ditingkatkan, karena kemiskinan merupakan tantangan besar yang sangat fluktuatif dengan banyaknya faktor penyebab kondisi tersebut. Salah satu kendala utama adalah

memastikan bahwa setiap unsur penyebab kondisi kemiskinan dapat terintegrasi dengan sasaran berkurangnya penduduk miskin.

Pencapaian sasaran berkurangnya penduduk misikin secara langsung di dukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Satu Data Keluarga Miskin
4. Program Penanggulangan Korban bencana

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dalam sasaran berkurangnya penduduk miskin, Pemerintah Daerah Kota Cirebon memastikan efektifitas dan efesiensi setiap program dan menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui arah kebijakan Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin., Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin, Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin. Untuk sinkronisasi maka penguatan dalam data keluarga miskin melalui program satu data keluarga miskin sangat urgent dilakukan, hal ini guna memastikan setiap program pendukung pemberantas kemiskinan bisa tepat sasaran. Selain upaya mengintegrasikan program internal Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat G to S *(Government to Society)* serta pihak swasta yaitu G to B *(Government to Business),* hal ini tidak lain karena kemiskinan merupakan masalah krusial yang dipengaruhi banyak faktor sehingga upaya dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat itu sendiri perlu terintegrasi dengan baik.

Sasaran 1.1.10 Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan

Tabel 3.19
Capaian Sasaran Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1.1.10	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan /PPH	Poin	77,80	79,90	84	84,10	105,14%
		Peningkatan PDRB dar sektor Pertanian	Persen	0,33	0,33	0,33	0,33	100%

Sasaran “Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan" dengan dua indikator : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Tingkat PDRB Sektor Pertanian, menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan kinerja Misi ke-1 : “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul dalam Segala Bidang”. Pola pangan harapan dan pdrb sektir pertanian memiliki korelasi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul , karena sangat erat kaitanya dengan indikator kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.

Pencapaian indikator ke-1 “Skor Pola Pangan Harapan /PPH”

Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah sebesar 79,9 poin. Berdasarkan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik

dengan melakukan survei tahun n-1, didapatkan hasil PPH konsumsi Kota Cirebon sebesar 84 poin, ini artinya kota Cirebon capaian indikator kinerja PPH Konsumsi sudah melampaui target sebesar 105,14% berpredikat **sangat baik**.

Pencapaian indikator ke-2

Indikator Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kota Cirebon menargetkan sebesar 0,33 % pada tahun 2019. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dalam dokumen PDRB (Produk Domestic Regional Bruto)menurut jenis lapangan usaha tahun 2014-2018, kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap PDRB semua sektor yang ada di Kota Cirebon sebesar 0,33 %. Data tersebut menjadi data masukan dalam rangka penyusunan laporan PDRB sektor pertanian, dimana pada tahun 2019 berada pada posisi 0,33% hal ini berarti pencapaian kinerja pada indikator inimencapai target atau 100% atau berpredikat **sangat baik.**

Evaluasi Sasaran 1.1.10 “Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan"

Jika disandingkan dengan PPH konsumsi nasional maupun provinsi Jawa Barat, PPH Konsumsi Kota Cirebon masih di bawah capaian di tingkat provinsi maupun Nasional. Untuk PPH Konsumsi Provinsi Jawa Barat mencapai 85,2 poin, sedangkan PPH Konsumsi Tingkat Nasional mencapai 91,3 poin. Namun jika dilihat dari capaian yang didapatkan oleh pemerintah Daerah Kota Cirebon, PPH Konsumsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik, seperti pada tahun 2018 PPH Konsumsi di angka 77,8 poin, pada tahun 2019 mencapai angka 84 poin. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah kota Cirebon khususnya Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan sebagai pemangku kepentingan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya mengampu 3 urusan yaitu urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan yang telah melaksanakan program kegiatannya sehingga pencapaian indkator tersebut dapat memperoleh hasil yang optimal, walaupun masih harus lebih terus ditingkatkan semaksimal mungkin.

PDRB sector pertanian dengan posisi saat ini yang telah mencapai target dinilai sudah cukup baik mengingat pertanian bukan menjadi skala prioritas dalam pembangunan di Kota Cirebon, seiring lahan pertanian yang tidak begitu luas dan potensi Kota Cirebon yang bukan berada pada bidang tersebut.

Dalam rangka mempertahankan dam meningkatkan pencapaian di masa yang akan datang Pemerintah Daerah Kota Cicrebon memastikan strategi Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat dengan arah kebijakan Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam dan Meningkatkan produktifitas pertanian, kelautan dan perikanan berjalan melalui efektifitas dan efesiensi program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
3. Program Pembinaan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah
4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
9. Program Pencegahan Penyakit Hewan
10. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
11. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya
12. Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Sasaran 1.1.11 Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif

Tabel 3.20
Capaian Sasaran Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1.1.11	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	Meningkatnya PDRB dari sector pariwisata	persen	n/a	5,55	7,72	5,87	139%

Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi sasaran yang mendukung Misi ke-1, sasaran ini memiliki 1 indikator sebagai tolak ukur pencapaian yaitu meningkatnya PDRB dari sektor pariwisata. PDRB sektor pariwisata lazim dijadikan sebuah gambaran bagaimana peran pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomis inklusif, karena memuat data pengukuran kontribusi produksi dari sektor pariwisata.

Pencapaian Indikator "Meningkatnya PDRB dari Sektor Pariwisata"

Capaian Kinerja Kontribusi pariwisata terhadap PDRB nilai capaian kinerjanya mencapai 139% atau "SANGAT BAIK". Angka tersebut diperoleh dari Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (persen) 2014–2018, penjumlahan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya pada Buku Produk Domestik Bruto Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha 2014-2018 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon.

Berikut adalah sektor pendukung penyumbang nilai PDRB Pariwisata:

1. **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

   Penyediaan akomodasi dan makan minum menyumbang nilai sebesar 5,37%. Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

- Penyediaan Akomodasi

  Sub kategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

- Penyediaan Makan dan Minum

  Kegiatan sub kategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran self service atau restoran take away, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

2. **Jasa Lainnya**

   Kategori Jasa Lainnya menyumbang nilai sebesar 2,35%. Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan empat kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai

kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

- **Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi**

  Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R di dalam KBLI 2009. Kategori ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Evaluasi Sasaran 1.1.11 : Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pencapaian sasaran Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dengan nilai 136% adalah sangat baik,jika disandingkan dengan target RPJMD realisasi pada tahun 2019 sebesar 7,72% bahkan telah melebihi target akhir dari RPJMD yaitu 5,87%. Hal ini merupakan kabar baik sekaligus tantangan tersendiri untuk tetap mempertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Pertumbuhan industry dan usaha perdagangan dan jasa lainya di sector pariwisata yang meningkat seiring jumlah wisatawan ke Kota Cirebon yang tinggi menjadi factor penting dalam tingginya PDRB sector pariwisata pada tahun 2019, sementara itu meningkatnya jumlah wisatawan sangan erat kaitannya dengan pengembangan destinasi wisata baik kegiatan event kebudayaan dan kepariwisataan maupun promosi dan inovasi dalam destinasi wisata di Kota Cirebon yang cukup signifikan di tahun 2019. Atas dasar hal tersebut arah kebijakan dari strategi meningkatkan potensi daya tarik dan promosi wisata dinilai telah cukup berjalan efektif

dan efesien, dimana arah kebijakan tersebut didukung oleh Program Pengembangan Kepariwisataan sebagai satu-satunya program yang secara langsung mendukung sasaran 1.1.11 ini. Selain program tersebut peran sektor masyarakat dan swasta dinilai sangat berpengaruh dalam mengembangkan kepariwisataan di Kota Cirebon. Berdasarkan potensi ini seyogyanya Pemerintah Daerah Kota Cirebon mempertahankan momentum kerja sama yang baik dalam jaringan kepariwisataan dengan sector masyarakat khususnya influencer di media social dan sector swasta yang menyediakan jasa di bidang pariwisata.

Sasaran 1.1.12 Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama

Tabel 3.21
Capaian Sasaran Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1.12	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	Konflik antar umat beragama	Kasus	0	0	0	0	100%

Sasaran Meningkatnya kerukunan umat Beragama dengan indikator kinerja Konflik antar umat beragama menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan Misi ke-1. Kualitas sumber daya manusia ditandai salah satunya adalah dengan terciptanya kondisi masyarakat beradab yang penuh toleransi dan dapat hidup berdampingan dengan damai serta minim konflik.

Pencapaian Indikator "Konflik antar umat beragama"

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan jumlah konflik antar umat beragama pada target maksimal yaitu 0 / nol kejadian. Target ini terbilang cukup tinggi karena potensi terjadinya konflik di Kota Cirebon tidaklah rendah mengingat heterogen nya komposisi demografi masyarakat di Kota Ini. Namun patut

disyukuri berdasarkan data yang disampaikan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2019 tidak tercatat satupun kejadian terkait konflik antar umat beragama, maka pencapaian atas indikator ini adalah 100%. Dengan predikat **Sangat Tinggi.**

Evaluasi Sasaran 1.1.12 "Meningkatnya kerukunan umat Beragama"

Pencapaian Sasaran meningkatnya kerukunan umat beragama berada dalam kategori atau predikat sangat tinggi dimana satu-satunya indikator sebagai tolak ukur pencapaian sasaran dapat dilaksanakan sepenuhnya. Keberhasilan ini sekaligus menjadi tantangan kedepan nya untuk tetap dipertahankan dimana kondisi demografi Kota Cirebon yang heterogen dan atmosfer konflik khususnya SARA di tingkat nasional yang sangat fluktuatif menjadi celah kemungkinan yang cukup tinggi terjadinya konflik antar umat beragama yang dapat mencederai kerukunan umat beragama.

Strategi Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat dengan arah kebijakan Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan, meningkatkan peran tokoh agama dalam memperkuat implementasi nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan implementasi pelaksanaan nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan intensitas pelaksanaan kegiatan keagamaan, seperti dzikir akbar, Cirebon Bershalawat, dan kegiatan-kegiatan dialog antar umat beragama dinilai telah cukup efektif dengan pencapaian target pada tahun 2019. Strategi dan arah kebijakan tersebut di dukung program Program Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. selain hal tersebut terbentuknya Forum Kerukuan Antar Umat Beragama menjadi sangat efektif untuk meminimalisir isu gesekan antar umat beragama.

Sasaran 1.1.13 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal

Tabel 3.22
Capaian Sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal
Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1.13	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persen	n/a	71,31	53,69	80,61	75,29%

Sasaran "Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal" dengan Indikator : Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan dan Misi ke-1. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal menjadi strategis mengingat pada perencanan jangka menengah 2019-2023 Visi Kota Cirebon adalah "SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah".

Pencapaian Indikator "Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan"

Pada Tahun 2019 target dari indikator "Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan" adalah 71,31%, objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dihitung dari 10 jenis objek yang berbeda yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pada tahun 2019 Dinas Kepemudaan, Olahrga, Kebudayaan, dan Pariwisata melakukan upaya pendataan sekaligus pelestarian dan menghasilkan kesimpulan atas objek pemajuan kebudayaan yang aktif (lestari) dan tidak aktif sebagai berikut :

Tabel 3.23
Data Objek Pemajuan Kebudayaan

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:	Yang Ada	Yang Aktif
a. Tradisi Lisan	32	20
b. Manuskrip	10	5
c. Adat istiadat	27	14
d. Ritus	28	10
e. Pengetahuan Tradisional	35	20
f. Teknologi Tradisional	9	9
g. Seni	27	20
h. Bahasa	5	5
i. Permainan Rakyat	20	0
j. Olahraga Tradisional	10	6
Jumlah	**203**	**109**
Presentase		**53,69%**

Sumber : Laporan Pemajuan Objek Kebudayaan DKOKP, di olah

Gambar 3.8
Persentase Keaktifan Objek Pemajuan Kebudayaan

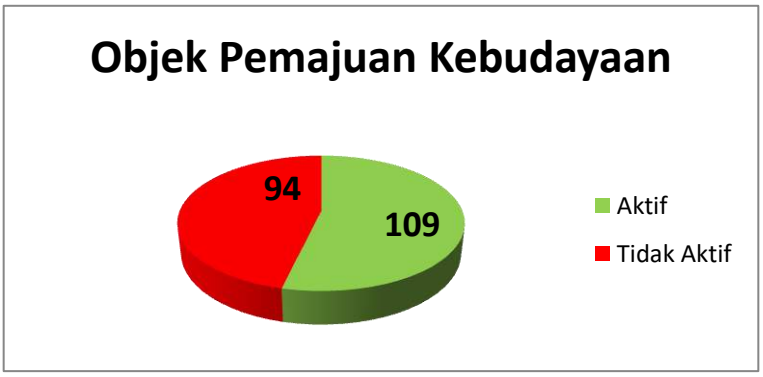

Dari data ini dapat dihitung bahwa realisasi pemajuan kebudayaan mencapai 53,69% dari target 71,31%, berarti tingkat pencapaian indikator adalah 75,29% , berada dalam predikat pencapaian "**Baik"**.

Evaluasi Sasaran 1.1.13 : Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal

Tingkat pencapaian terhadap sasaran yang ditunjukan dengan tingkat capaian indikator pada tahun 2019 tidak begitu signifikan, pencapaian predikat Baik (75,29%) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Beberapa faktor kurang memuaskanya pencapaian sasaran ini diantaranya sebagai berikut :

1. Sangat banyak dan kompleksnya data objek pemajuan kebudayaan disatu sisi keterbatasn sumber daya dalam melakukan stimulus pelestarian terhadap objek kebudayaan local tersebut.
2. Penetapan target yang terlampau tinggi, dikarenakan sebagai sebuah ktarget di tahun pertama RPJMD, kondisi awal (2018) tidak ditemukanya data sementara objek kebudayaan di Kota Cirebon kompleksitasnya cukup tinggi.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada sasaran ini di tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan memeastikan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang telah di susun :

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan local	▪ Melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan Cirebon	▪ Meningkatkan pelestarian dan legalitas seni dan budaya local
	▪ Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan local	▪ Perlindungan, pengembangan dan penataan cagar budaya

Strategi dan arah kebijakan tersebut di topang oleh program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
2. Program Pegelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Berdasarkan kendala yang telah diurai bahwasanya kekurangan sumber daya di internal Pemerintah Daerah Kota Cirebon menyebabkan sulitnya melakukan pelestarian terhadap objek kebudayaan yang begitu kompleks maka strategi memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan lokal melalui program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya harus menjadi prioritas langkah antisipasi terhadap pencapaian yang kurang memuaskan di tahun 2020.

Sasaran 1.1.14 : Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan

Tabel 3.24
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ KelurahanTahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1.1.14	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan	Kurang Berkemban	Kelurahan	0	0	0	0	100
		Berkembang	Kelurahan	8	8	22	9	275
		Cepat Berkembang	Kelurahan	13	13	15	13	115,4

“Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan” menjadi salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Misi 1 Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul salah satu gambaran kondisi yang ada adalah dengan tingkat kualitas pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan. Sasaran ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengansejumlah indikator yang beberapa diantaranya merupakan sub indikator yang membangun indikator utama lainya,sub indikator tersebut sangat soesifik pada masing-masing kelurahan, sehingga dalam uraian Laporan Kinerja ini

akan diuraikan indikator utama sebagai bentuk rekapitulasi dari indikator yanga tercantum di 22 kelurahan, berikut adalah indikator tersebut :

1. Kualitas Pemberdayaan kelurahan Kurang Berkembang
2. Kualitas Pemberdayaan kelurahan Berkembang
3. Kualitas Pemberdayaan kelurahan Sangat Berkembang

Pencapaian Indikator ke-1 "Kurang Berkembang"

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan Kurang Berkembang yang ditunjukan dengan kondisi perkembangan kelurahan kurang berkembang adalah 0 atau tidak ada kualitas pemberdayaan kelurahan yang kurang berkembang. Dalam tiga kategori kualitas pemberdayaan kelurahan, kurang berkembang adalah tingkat terendah, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Cirebon optimis untuk menargetkan tidak ada kelurahan yang berada pada kondisi tersebut. Berdasarkan hasil penilaian yang diperkuat dengan Berita Acara Nomor : 414.4/047-DSPPPA/2019 Tentang Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Pada 22 Kelurahan Di Kota Cirebon Tahun 2019, bahwasanya jumlah kualitas pemberdayaan kelurahan yang ditunjukan dengan tingkat perkembangan kelurahan adalah 0 kelurahan, maka realisasi tersebut mencapai target, yaitu sebesar 100% dengan predikat S**angat Baik.**

Pencapaian Indikator ke-2 " Berkembang"

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan Kurang Berkembang yang ditunjukan dengan kondisi perkembangan kelurahan berkembang adalah 8 kelurahan. Berdasarkan hasil penilaian yang diperkuat dengan Berita Acara Nomor : 414.4/047-DSPPPA/2019 Tentang Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Pada 22 Kelurahan Di Kota Cirebon Tahun 2019, bahwasanya jumlah kualitas pemberdayaan kelurahan yang ditunjukan dengan tingkat perkembangan kelurahan pada posisi berkembang adalah 7 kelurahan, sementara pada posisi sangat berkembang adalah 15 kelurahan, sehingga dapat

dikatakan bahwa 15 kelurahan yang sangat berkembang melewati atau juga berada pada kondisi berkembang sehingga total kelurahan berkembang dalam rangka pengukuran kinerja adalh berjumlah 22. Realisasi tersebut melebih target, yaitu sebesar 275% dengan predikat S**angat Baik.**

Pencapaian Indikator ke-3 " Sangat Berkembang"

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan Sangat Berkembang yang ditunjukan dengan kondisi perkembangan kelurahan sangat berkembang adalah 13 kelurahan. Berdasarkan hasil penilaian yang diperkuat dengan Berita Acara Nomor : 414.4/047-DSPPPA/2019 Tentang Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Pada 22 Kelurahan Di Kota Cirebon Tahun 2019, bahwasanya jumlah kualitas pemberdayaan kelurahan yang ditunjukan dengan tingkat perkembangan kelurahan pada posisi sangat berkembang adalah 15 kelurahan, Realisasi tersebut melebih target dari 13 kelurahan , yaitu sebesar 115,4% dengan predikat **Sangat Baik.**

Evaluasi Sasaran 1.1.14 "Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan"

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan tiga (3) indikator memiliki rata-rata pencapaian sebesar 163,4% pencapaian ini berada dalam predikat **Sangat Baik**. Pencapaian yang sangat baik ini merupakan hasil kerja keras pelaksanaan program peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang efektif dan efesien sebagai bagian dari strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Koordinasi yang terjalin dengan baik antar pemangku kepentingan diantaranya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan sebagai induk dari kelurahan, serta Sekretariat Daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan kualitas pemberdayaan kelurahan. Kendati pencapaian Sasaran ini sudah Sangat Baik masih terdapat beberapa kendala sbegai berikut :

1. Urbanisasi yang cukup tinggi meningkatkan jumlah penduduk tidak tetap di kelurahan yang berada pada wilayah perkotaan. Kepadatan tinggi yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan lingkungan kumuh dan kontra produktif dengan keberdayaan.
2. Program pemberdayaan yang terbatas masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat di tingkat kelurahan.
3. Masih terdapat kelompok masyarakat yang enggan untuk memanfaatkan program terkait pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pencapaian sasaran ini, Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. menjaga koordinasi antar pemangku kepentingan terjalin dengan baik sehingga program yang diselenggarakan dapat selaras dengan praktik di lapangan,
2. selain pemangku kepentingan antara G to G (Government to Government), perlu ditingkatkan kembali koordinasi dan sinergitas dengan objek dari pemberdayaan yaitu masyarakat kelurahan itu sendiri, sehingga selain menjadi obyek pemberdayaan, masyarakat pun terlibat sebagai subjek atau pelaku pemberdayaan.
3. Melakukan Inovasi di bidang pemberdayaan Masyarakat, serta fokus pada pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadi solusi dalam isu sosial-ekonomi yang ada di masyarakat, khususnya permasalahan ekonomi.
4. Memperhatikan perencanaan di lingkup pemberdayaan masyarakat sesuai dengan demografi kependudukan,khususnya dalam menyikapi bonud demografi di Kota Cirebon.

Misi 2 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif"

Sesuai dengan arahan Misi 6, RPJPD, yaitu **(6) "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Umum Diikuti Dengan Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa",** yang ditandai dengan :

a. Terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa, efektif dan efisien.
b. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang taat pada hukum dan mampu mengayomi masyarakat dengan optimal.
c. Organisasi pemerintahan yang tertata dengan baik dan berfungsi dengan optimal.
d. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki produktifitas yang tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui instansi masing-masing.

Misi ini merupakan arahan untuk meningkatkan daya saing pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Sebagai tolak ukur dalam mewujudkan Misi 2, ditetapkan 1 tujuan dan 11 sasaran yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan

Tabel 3.25
Capaian Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan

NO	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
2.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	57,29	60	71,21	80	118,3%

Tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan" diukur dengan sebuah Indikator : "Indeks reformasi Birokrasi". Indeks ini relevan menjadi tolak ukur dalam menilai secara umum kapabilitas dan manajeman Pemerintahan di suatu Instansi karena cakupan faktor dalam pengukuran indeks reformasi cukup luas dengan mengukur 7 faktor dalam dimensi proses yaitu : manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan. Disamping itu juga diukur faktor dalam dimensi hasil yaitu : kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik.

Pencapaian Indikator Tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi"

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan indeks reformasi birokrasi pada poin 60 , naik 0,3 poin dari tahun sebelumnya di tahun 2018

sebesar 0,57. Berdasarkan evaluasi yang dirilis oleh tim dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kota Cirebon mendapatkan poin Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 71,21. Dengan rincian sebagai berikut :

LKE PMPRB

Instansi	:	Pemerintah Kota Cirebon
Jumlah Unit Kerja	:	9
Jumlah Unit Terdaftar	:	31
Jumlah Penilaian	:	9
Penilaian Utama	:	9
Tahun	:	2019
Status	:	3
Total Proses	:	42.72
Total Hasil	:	28.49
Indeks RB (Total)	:	71.21

			Penilaian	Bobot	Pilihan Jawaban		Indeks RB
					PUSAT	UNIT	
A.			PROSES (60)				
	I.		MANAJEMEN PERUBAHAN (3)	5.00	2.13	1.43	3.56
		1	Tim Reformasi Birokrasi (1)	0.50	0.39	0.29	0.68
		2	Road Map Reformasi Birokrasi (1)	0.50	0.43	0.26	0.69
		3	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)	1.00	0.95	0.67	1.62
		4	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)	0.50	0.35	0.21	0.56
	II.		PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)	5.00	2.5	0.94	3.44
		1	Harmonisasi (2,5)	1.25	0.63	0.94	1.56
		2	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (2,5)	2.50	1.88	0	1.88
	III.		PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)	6.00	4.5	1.13	5.63
		1	Evaluasi (3)	1.50	1.5	1.13	2.63
		2	Penataan (3)	3.00	3	0	3
	IV.		PENATAAN TATALAKSANA (5)	5.00	1.5	1.38	2.88
		1	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)	0.625	0.25	0.38	0.63
		2	E-Government (2)	0.75	0.63	0.54	1.17
		3	Keterbukaan Informasi Publik (1,5)	0.625	0.63	0.46	1.08
		4	Kualitas Pengelolaan Arsip	1.00	0	0	0
	V.		PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)	15.00	9.76	2.49	12.25
		1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (1)	0.50	0.33	0.37	0.7
		2	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN (2)	2.00	2	0	2
		3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1)	0.50	0.28	0.27	0.55
		4	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)	6.00	5.6	0	5.6
		5	Penetapan kinerja individu (2)	1.00	0.34	0.78	1.12
		6	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1)	0.50	0.36	0.37	0.73
		7	Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)	0.50	0.4	0.2	0.59
		8	Sistem Informasi Kepegawaian (1)	0.50	0.45	0.5	0.95
	VI.		PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)	6.00	2.62	2.13	4.75
		1	Keteribatan pimpinan (2)	1.00	0.78	0.93	1.71
		2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)	2.00	1.84	1.2	3.04
	VII.		PENGUATAN PENGAWASAN (12)	12.00	4.09	2.19	6.28
		1	Gratifikasi (1,5)	0.75	0.45	0.24	0.69
		2	Penerapan SPIP (1,5)	0.75	0.38	0.62	1
		3	Pengaduan Masyarakat (2)	1.00	1	0.49	1.49
		4	Whistle-Blowing System (1,5)	0.75	0.53	0.25	0.78
		5	Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)	0.75	0	0.16	0.16
		6	Pembangunan Zona Integritas (2,5)	1.25	0.94	0.42	1.35
		7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)	1.50	0.8	0	0.8
	VIII.		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)	6.00	1.31	2.64	3.95
		1	Standar Pelayanan (1)	0.50	0.5	0.3	0.8
		2	Budaya Pelayanan Prima (1)	0.50	0.37	0.34	0.7
		3	Pengelolaan Pengaduan (1,5)	0.00	0	0.95	0.95
		4	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)	0.00	0	0.65	0.65
		5	Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)	0.50	0.45	0.4	0.85
			TOTAL PENGUNGKIT		28.4	14.32	42.72
B.			HASIL (40)				
	I.		KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)	20.00			12.74
		1	Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)	14.00	9.14	Penilaian Pusat	9.14
		2	Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)	6.00	3.6	Penilaian Pusat	3.6
	II.		PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)	10.00			8.25
		1	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)	7.00	5.25	Penilaian Pusat	5.25
		2	Opini BPK (3)	3.00	3	Penilaian Pusat	3
	III.		KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10.00			7.5
		1	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)	10.00	7.5	Penilaian Pusat	7.5
TOTAL HASIL				40.00			28.49
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				100.00			71.21

Dengan poin Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 71,21 maka pencapaian indkator kinerja pada tahun 2019 melebih target yaitu sebesar 118,33%.

Evaluasi Tujuan ”Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan”

Pencapaian Indikator dari tujuan ”Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan” yang melebihi target, merupakan hasil dari semangat melakukan reformasi birokrasi di Kota Cirebon. Salah satu kegiatan yang memicu semangat

reformasi birokrasi ini diantaranya adalah penandatangan bersama oleh Wali Kota dan Kepala Perangkat Derah terkait Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi pada pertengahan tahun 2019.

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian saat ini, Pemerintah Daerah Kota Cirebon memberikan perhatian lebih pada faktor-faktor pengukuran yang pada saat evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 masih berada di bawah rata-rata pencapaian faktor lainya, diantaranya adalah pada faktor Penataan tatalaksana, dimana nilai maksimal 5 namun hanya mendapat poin 2,88. dari beberapa sub faktor nilai terendah ada di sub faktor kualitas pengelolaan kearsipan. Selain itu mempertahankan faktor yang dinilai cukup tinggi dalam evaluasi pada tahun 2019 diantaranya :

1. Faktor Penataan dan Penguatan Organisasi, dari total 6 mendapat poin 5,74
2. Faktor Penataan Sistem Manajemen SDM, dari total 15 Poin mendapatkan poin 12,25
3. Faktor Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dari total 10 poin mendapatkan poin 8,25

Untuk menunjang tujuan pada Misi 2, telah ditetapkan 11 sasaran yang sinergis, dimana setiap sasaran pengukuran, analisa dan evaluasinya akan diuraikan satu persatu secara rinci sebagai berikut :

Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur

Tabel 3.26
Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur Tahun 2019

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ 2018	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
2.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur	Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi	Persen	8,00	12,40	26,08	16,50	210,32

		Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	Persen	80,00	80,50	80,35	82,50	99,81
		Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin	Persen	85,00	87,00	92,72	91,50	106,6
		Persentase Kepatuhan Pegawai untuk Memenuhi Penyampaian LHKPN	Persen	70,30	80,00	97,37	100,00	121,7

Sasaran “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur” diukur dengan 4 Indikator sebagai berikut :

1. Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi dengan target pada tahun 2019 adalah sejumlah 12,40%
2. Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target, dengan target pada tahun 2019 adalah 80,50%
3. Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin, dengan target pada tahun 2019 adalah 87,0%
4. Persentase Kepatuhan Pegawai untuk Memenuhi Penyampaian LHKPN, dengan target pada tahun 2019 adalah 80,00%

Pencapaian Indikator ke-1 Persentase ASN yang direkrut sesuai kompetensi

Untuk indikator pertama “Prosentase ASN yang direkrut sesuai Kompetensi” berdasarkan data pada tahun 2019, jumlah formasi yang diterima sebanyak 218 formasi, sementara jumlah kebutuhan formasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebanyak 836 formasi. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa realisasi kinerja pada indikator sasaran ini untuk tahun 2019 adalah 26,08%,

lebih tinggi dari target yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu 12,40%, sehingga capaian kinerja mencapai 210,32%.

Pencapaian Indikator ke-2 Persentase Pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target

Indikator kedua yaitu “Persentase Pegawai yang capain kinerja sesuai target” pada tahun 2019 hanya mencapai 80,35% dari target yang ditetapkan yaitu 80,50% sehingga capaian kinerja untuk indikator ke dua ini hanya mencapai 99,81%. Pencapaian target tersebut berdasarkan data pada tahun 2019 yaitu dari seluruh perangkat daerah yang yang melaporkan SKP dapat diidentifikasi sebanyak 8.463 dengan penilaian sangat baik, 220.000 dengan penilaian baik dan 140.000 dengan penilaian cukup, sehingga total nilai SKP seluruh pegawai yang mengirimkan SKP adalah 228.603 dari 2845 pegawai, sementara itu masih terdapat 27 perangkat daerah yang tidak melaporkan SKP ke BKPPD Kota Cirebon sehingga nilai capaian kinerja pada indikator ini belum mencapai 100%.

Pencapaian Indikator ke-3 Prosentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin

Indikator ke tiga “Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturan disiplin” dengan target kinerja sebesar 87,00% untuk tahun 2019 dapat terealisasi sebesar 92,72%. Dari total hari kerja selama satu tahun (1.270.368 hari/4812 pegawai) terdapat 92.426 hari pegawai yang kurang tingkat kehadirannya. Adapun rincian ketidakhadiran pegawai tersebut dengan keterangan “cuti sakit” sebanyak 13.692 hari, “izin” sebanyak 6.931 hari, “dinas luar” sebanyak 49.335 hari, “cuti tahunan” sebanyak 15.053 hari, “cuti alasan penting” sebanyak 813 hari, “cuti bersalin” sebanyak 5.355 hari, dan “cuti besar” sebanyak 1.247 hari.